MJPA : Musamus Journal of Public Administration
Volume 9. No. 1. (Oktober, 2026), hlm 210-223
ISSN/pISSN:2622917X/26226499

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Usman. M[1*]; La Ode Muh. Elwan[2]; Syahrabudin Husein Enala[3]; Aenal Fuad Adam[4]

[12]Administrasi Publik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ;
[3]Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Merauke, Indonesia ;
[4]Ilmu Politik Universitas Musamus, Merauke, Indonesia ;

* usmanadmpublik@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan administrasi publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kompleksitas permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data direncanakan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *collaborative governance* yang menekankan kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah serta menghasilkan rekomendasi penguatan koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kemitraan lintas sektor. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik, khususnya penerapan *collaborative governance* dalam tata kelola lingkungan perkotaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Kendari dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *collaborative governance*; pengelolaan sampah; partisipasi masyarakat.

Abstract

Urban waste management is one of the major challenges in public administration, requiring the involvement of various stakeholders. The complexity of waste management issues is not only related to limitations in infrastructure and facilities but also to local government capacity, community participation, and coordination among government institutions, the private sector, and environmental communities. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in urban waste management in Kendari City, Southeast Sulawesi, identify the supporting and inhibiting factors affecting collaboration, and formulate strategies to strengthen participatory and sustainable waste management governance. This study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data are planned to be collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, field observations, and document analysis. The data analysis uses the collaborative governance framework, which

emphasizes initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes, including face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, and shared understanding. This study is expected to provide insights into the dynamics of stakeholder relationships in waste management and generate recommendations for strengthening institutional coordination, community participation, and cross-sector partnerships. Theoretically, this research is expected to contribute to public administration scholarship, particularly the application of collaborative governance in urban environmental management. Practically, the findings are expected to provide recommendations for the Kendari City Government in developing a more integrated, inclusive, and sustainable waste management system.

Keywords: *collaborative governance; waste management; community participation*

Pendahuluan

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu persoalan strategis dalam penyelenggaraan administrasi publik karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warga. Peningkatan aktivitas penduduk, konsumsi rumah tangga, dan kegiatan ekonomi perkotaan berpotensi meningkatkan timbulan sampah sekaligus memperbesar tuntutan terhadap sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengelolaan sampah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola yang melibatkan pembagian kewenangan, koordinasi kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah memerlukan pendekatan administrasi publik yang mampu mengintegrasikan kapasitas pemerintah dengan sumber daya dan inisiatif aktor nonpemerintah.

Dalam konteks pembangunan perkotaan di Indonesia, pengelolaan sampah menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya pemilahan sampah dari sumbernya, serta kebutuhan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan organisasi publik membangun hubungan kerja yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan membutuhkan keselarasan antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, perubahan perilaku masyarakat, dan dukungan sektor swasta. Dengan demikian, pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana berbagai aktor dapat menyatukan kepentingan, sumber daya, dan tanggung jawab dalam mengatasi persoalan lingkungan perkotaan.

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah di Kota Kendari telah membahas implementasi kebijakan berdasarkan perspektif pembangunan

berkelanjutan. Sudirman dan Phradiansah (2019), misalnya, mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari dengan menghubungkannya pada dimensi pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami keterkaitan antara implementasi kebijakan, kapasitas pemerintah, dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Munawir et al. (2024) menelaah keberlanjutan pengelolaan sampah di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, sinergi antarlembaga, tujuan program, serta dukungan sarana dan prasarana. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Kendari perlu dianalisis dengan mempertimbangkan dimensi kebijakan dan kelembagaan, bukan hanya aspek teknis operasional.

Perkembangan kajian administrasi publik juga menunjukkan pentingnya pendekatan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola ketika lembaga publik melibatkan aktor nonnegara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada konsensus. Dalam model tersebut, keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal hubungan antarpihak, ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, desain kelembagaan, serta kepemimpinan fasilitatif. Kerangka ini relevan dalam pengelolaan sampah karena pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan secara mandiri. Masyarakat, pelaku usaha, komunitas lingkungan, pengelola bank sampah, dan kelompok informal yang terlibat dalam rantai pengelolaan sampah memiliki sumber daya serta kepentingan yang dapat saling melengkapi apabila difasilitasi melalui mekanisme kolaborasi yang jelas.

Selain model Ansell dan Gash, penelitian ini mempertimbangkan kerangka integratif *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kerangka tersebut menjelaskan tata kelola kolaboratif melalui konteks sistem yang lebih luas, penggerak kolaborasi, dinamika kolaborasi, serta tindakan bersama dan dampak yang dihasilkan. Dinamika kolaborasi mencakup keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif. Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa kolaborasi tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan forum atau jumlah aktor yang terlibat, tetapi juga perlu dianalisis melalui kualitas interaksi, pembentukan kepercayaan, kesepakatan tujuan, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan menghasilkan tindakan bersama. Dalam penelitian pengelolaan sampah, kerangka tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah hubungan antarpemangku kepentingan telah berkembang menjadi kerja sama yang substantif atau masih terbatas pada koordinasi administratif dan kegiatan yang bersifat sektoral.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat relevansi pendekatan tersebut, tetapi sekaligus menunjukkan perlunya memperjelas fokus analisis. Pabia, Matsunami, dan Subanu

(2022), melalui penelitian mengenai penerapan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari, menunjukkan relevansi kolaborasi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam implementasi kebijakan daerah. Penelitian tersebut menyoroti proses pengambilan keputusan, tindakan bersama, dan berbagi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun konteks kebijakannya berbeda, kajian tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya keterlibatan aktor, kesamaan tujuan, dan mekanisme kerja sama dalam tata kelola daerah. Di sisi lain, Munawir et al. (2024) lebih menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perlu menghubungkan dimensi kelembagaan tersebut dengan proses interaksi dan hubungan antarpemangku kepentingan secara lebih terarah.

Berdasarkan kajian tersebut, kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak ditelaah terletak pada kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana proses kolaborasi berlangsung dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari, termasuk bagaimana para aktor membangun kepercayaan, menyepakati tujuan bersama, membagi peran dan sumber daya, serta mengatasi kendala koordinasi. Penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa kolaborasi di Kota Kendari sama sekali belum pernah dikaji. Sebaliknya, penelitian ini berupaya memperjelas dimensi proses kolaboratif yang menjadi fokus analisis dan menghubungkannya dengan persoalan pengelolaan sampah. Dengan demikian, posisi penelitian ini berbeda dari kajian yang terutama berfokus pada implementasi kebijakan atau kapasitas kelembagaan, karena perhatian analitis diarahkan pada mekanisme hubungan antarpemangku kepentingan dan implikasinya terhadap penguatan tata kelola pengelolaan sampah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari, dengan perhatian pada hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, komunitas lingkungan, dan aktor lain yang relevan berdasarkan temuan lapangan. Analisis diarahkan pada empat aspek utama, yaitu kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Kondisi awal mencakup kepentingan, sumber daya, serta hubungan antarpihak sebelum dan selama kolaborasi berlangsung. Desain kelembagaan mencakup aturan partisipasi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi. Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan kemampuan aktor penggerak dalam membangun komunikasi dan menjembatani kepentingan. Adapun proses kolaboratif mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan upaya mencapai tindakan kolektif. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika kolaborasi secara kontekstual.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada bidang tata kelola lingkungan dan manajemen pelayanan publik. Secara teoretis, penelitian ini menerapkan kerangka *collaborative governance*

untuk menjelaskan hubungan antara kondisi kelembagaan dan proses interaksi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Secara empiris, penelitian ini berupaya memperkaya kajian tentang Kota Kendari dengan memusatkan perhatian pada proses kolaborasi yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai penguatan forum kolaborasi, kejelasan pembagian peran, mekanisme koordinasi, partisipasi masyarakat, dan kemitraan lintas sektor. Kontribusi tersebut penting agar pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada kapasitas pemerintah, tetapi juga ditopang oleh keterlibatan dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses kolaborasi; serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga rumusan masalah: (1) bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari; (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kolaborasi antarpemangku kepentingan; dan (3) strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan sampah perkotaan secara berkelanjutan. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi dasar bagi pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan pemahaman empiris serta rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Pemerintah Kota Kendari dan para pemangku kepentingan terkait.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada dinamika interaksi antarpemangku kepentingan, mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Kendari.

Subjek penelitian meliputi para pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah perkotaan, yaitu unsur pemerintah daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kebersihan, pemerintah kecamatan dan kelurahan yang relevan, pengelola bank sampah, komunitas lingkungan, pelaku usaha, serta masyarakat. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman,

kewenangan, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah. Informan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, koordinasi kelembagaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, kedalaman informasi yang diperoleh, serta kecukupan data untuk menjawab rumusan masalah.

Objek penelitian dibatasi pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Analisis difokuskan pada kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Kondisi awal kolaborasi mencakup distribusi sumber daya, kepentingan, dan hubungan antarpemangku kepentingan; desain kelembagaan berkaitan dengan aturan partisipasi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi; sedangkan kepemimpinan fasilitatif mencakup kemampuan aktor penggerak dalam membangun komunikasi dan menjembatani kepentingan. Adapun proses kolaboratif dianalisis melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran teknis volume sampah atau perhitungan efisiensi biaya secara kuantitatif, tetapi pada aspek-aspek tersebut sepanjang berkaitan dengan koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan efektivitas kolaborasi.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta observasi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Kendari. Data tersebut mencakup informasi mengenai pola koordinasi, mekanisme komunikasi, pembagian peran, partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan perencanaan daerah, laporan program pengelolaan sampah, data statistik resmi, dokumen kelembagaan, serta artikel jurnal dan publikasi ilmiah yang relevan. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memahami fenomena secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pengetahuan informan mengenai proses kolaborasi, pengambilan keputusan, hubungan antarpemangku kepentingan, serta hambatan dalam pengelolaan sampah. Observasi dilakukan pada lokasi dan aktivitas yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, praktik koordinasi, serta bentuk partisipasi masyarakat. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi dan sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan maupun pelaksanaan pengelolaan sampah. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk

membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, mengodekan, dan mengelompokkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis melalui uraian naratif dan pengelompokan tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan, persamaan, serta perbedaan informasi antarpemangku kepentingan. Selanjutnya, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), terutama mengenai kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, perbandingan informasi antar-informan, serta pemeriksaan kesesuaian temuan dengan dokumen pendukung. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang sistematis mengenai dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pola Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari

Pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari merupakan persoalan tata kelola publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Berdasarkan fokus penelitian, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan pelayanan pengangkutan, tetapi juga mencakup koordinasi antarinstansi, keterlibatan pemerintah kecamatan dan kelurahan, peran pengurus RT/RW, partisipasi warga, serta potensi kontribusi pengelola bank sampah dan sektor swasta.

Dalam struktur tata kelola tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan urusan persampahan sesuai kewenangannya. Pemerintah kecamatan dan kelurahan berpotensi menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Sementara itu, pengurus RT/RW, warga, dan pengelola bank sampah dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pengorganisasian masyarakat, pemilahan sampah, kegiatan kebersihan, dan penyampaian informasi mengenai persoalan persampahan.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah perlu dipahami sebagai hubungan antarpihak yang memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung pengurangan sampah dari sumbernya dan menjaga kebersihan lingkungan. Hubungan keduanya memerlukan koordinasi yang jelas agar pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dalam perspektif *collaborative governance*, keterlibatan banyak aktor belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan efektif. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya proses kolaboratif yang melibatkan dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Oleh karena itu, analisis pengelolaan sampah di Kota Kendari perlu menelusuri bukan hanya aktor yang terlibat, tetapi juga bagaimana koordinasi berlangsung, bagaimana tanggung jawab dibagi, dan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Koordinasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah

Koordinasi kelembagaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah perkotaan. Penanganan sampah melibatkan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan, mulai dari pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan atau pemanfaatan sampah. Pelaksanaan rangkaian tersebut memerlukan hubungan kerja yang jelas antara perangkat daerah dan unsur pemerintahan di tingkat wilayah.

DLHK menjadi salah satu aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan, sedangkan pemerintah kecamatan dan kelurahan memiliki kedekatan administratif dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kebutuhan pelayanan, mengidentifikasi persoalan kebersihan, mengoordinasikan kegiatan lingkungan, dan meneruskan keluhan warga kepada instansi terkait.

Namun, keberadaan pembagian peran secara administratif perlu dibedakan dari efektivitas koordinasi dalam praktik. Koordinasi dapat dinilai melalui kejelasan jalur komunikasi, kecepatan tindak lanjut terhadap keluhan, konsistensi pertukaran informasi, serta kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah pelayanan. Apabila koordinasi hanya berlangsung ketika terdapat keluhan atau kegiatan tertentu, hubungan antarlembaga berpotensi belum berkembang menjadi mekanisme kerja bersama yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kualitas koordinasi pengelolaan sampah di Kota Kendari perlu dianalisis berdasarkan pengalaman konkret para informan. Keterangan dari DLHK, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan perlu dibandingkan untuk mengetahui apakah pembagian tugas telah dipahami secara konsisten dan apakah informasi dari tingkat lingkungan benar-benar ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW dalam Mendorong Partisipasi Warga

Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT/RW menempati posisi strategis dalam membangun partisipasi masyarakat karena memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga. Ketiga unsur tersebut dapat membantu menyampaikan

informasi tentang kebersihan lingkungan, mengoordinasikan kegiatan bersama, dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota.

Partisipasi warga dalam pengelolaan sampah dapat diwujudkan melalui pemilahan sampah rumah tangga, penempatan sampah sesuai ketentuan, keikutsertaan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, penyetoran sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, serta penyampaian keluhan mengenai pelayanan pengangkutan. Bentuk partisipasi tersebut memiliki karakteristik berbeda. Pemilahan sampah membutuhkan perubahan kebiasaan rumah tangga, sedangkan kegiatan kebersihan memerlukan koordinasi waktu dan keterlibatan warga. Pengaduan pelayanan, di sisi lain, membutuhkan saluran komunikasi yang mudah diakses dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Peran RT/RW penting untuk menghubungkan kebutuhan pelayanan dengan kondisi lingkungan setempat. Meskipun demikian, pengurus lingkungan tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan. Kolaborasi justru memerlukan pembagian peran yang saling melengkapi: pemerintah memastikan pelayanan dan dukungan kelembagaan, sedangkan masyarakat mendukung pengelolaan sampah dari sumbernya serta menyampaikan informasi mengenai persoalan yang dihadapi.

Untuk menilai kondisi partisipasi di Kota Kendari, penelitian perlu mengidentifikasi bentuk keterlibatan warga yang benar-benar ditemukan di lokasi penelitian. Analisis juga perlu memperhatikan kemungkinan perbedaan tingkat partisipasi antarwarga, alasan sebagian warga aktif atau kurang terlibat, serta pengaruh informasi pelayanan, fasilitas, dan manfaat yang dirasakan terhadap keterlibatan masyarakat. Kesimpulan mengenai rendah atau tingginya partisipasi harus didasarkan pada keterangan informan dan bukti lapangan, bukan semata-mata pada asumsi umum mengenai perilaku masyarakat perkotaan.

Peran Bank Sampah dan Potensi Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Bank sampah dapat menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan tujuan kebersihan lingkungan dengan pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pencatatan, dan penjualan sampah tertentu, bank sampah berpotensi mengurangi jumlah sampah yang dibuang sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Keberlanjutan bank sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi atau fasilitas pengumpulan. Kegiatan tersebut juga membutuhkan partisipasi warga secara rutin, sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sarana penyimpanan, pembeli atau mitra penyalur, serta dukungan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pengelola. Hubungan dengan pemerintah dapat membantu memperkuat kapasitas kelembagaan, sedangkan kerja sama dengan sektor swasta berpotensi mendukung pemasaran dan pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam kerangka *collaborative governance*, bank sampah dapat menjadi ruang interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi. Akan tetapi, keterlibatan sektor swasta

dalam penelitian ini perlu dibuktikan secara empiris. Peneliti perlu memastikan apakah terdapat pengepul, pelaku usaha daur ulang, perusahaan, atau mitra lain yang benar-benar terlibat dalam praktik pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Jika keterlibatan tersebut belum ditemukan, sektor swasta lebih tepat dibahas sebagai potensi pengembangan kolaborasi, bukan sebagai aktor yang sudah terbukti berpartisipasi.

Analisis terhadap bank sampah juga perlu membedakan antara keberadaan kegiatan dan dampaknya. Keberadaan bank sampah belum otomatis menunjukkan berkurangnya volume sampah secara signifikan. Untuk menyimpulkan dampaknya, diperlukan informasi mengenai jenis dan jumlah sampah yang dikelola, frekuensi pengumpulan, jumlah warga yang berpartisipasi, serta keberlanjutan kegiatan dari waktu ke waktu.

Kendala dalam Membangun Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Kolaborasi pengelolaan sampah dapat menghadapi kendala pada aspek sumber daya, komunikasi, partisipasi masyarakat, dan pembagian tanggung jawab. Kendala tersebut perlu ditelusuri berdasarkan pengalaman para aktor yang terlibat karena setiap kelompok informan dapat memiliki sudut pandang yang berbeda.

Dari sisi penyelenggara pelayanan, persoalan yang perlu diperiksa mencakup kecukupan sarana dan prasarana, pengaturan jadwal pengangkutan, jangkauan layanan, dan mekanisme penanganan pengaduan. Dari sisi masyarakat, penelitian perlu mengidentifikasi hambatan dalam memilah sampah, mengikuti kegiatan kebersihan, mengakses pelayanan, atau memperoleh informasi mengenai ketentuan pembuangan sampah. Sementara itu, dari sisi petugas pengangkutan, kondisi akses jalan, volume sampah, penempatan sampah oleh warga, dan kesiapan sarana dapat menjadi aspek yang perlu dikonfirmasi melalui wawancara dan observasi.

Kendala lain yang perlu dianalisis adalah kemungkinan ketidaksesuaian antara tanggung jawab yang dipahami masyarakat dan pembagian tugas yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan. Jika masyarakat tidak mengetahui jadwal pengangkutan atau saluran pengaduan, misalnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui bukti lapangan sebelum dikaitkan dengan kelemahan komunikasi pemerintah. Demikian pula, apabila warga menilai pelayanan belum memadai, penilaian tersebut perlu dibandingkan dengan keterangan petugas dan informasi administratif yang relevan.

Perbandingan perspektif antaraktor menjadi penting untuk membangun penjelasan yang lebih seimbang. Keterangan pemerintah mengenai program tidak dapat secara otomatis dianggap mencerminkan pengalaman warga, sebagaimana keluhan masyarakat tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan kinerja pelayanan. Analisis yang mempertemukan berbagai perspektif memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik temu, perbedaan persepsi, dan persoalan yang memerlukan tindak lanjut.

Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari

Temuan penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kota Kendari dapat dianalisis menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

Pertama, **kondisi awal kolaborasi** berkaitan dengan latar belakang hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk distribusi sumber daya, pengalaman kerja sama sebelumnya, serta dorongan dan hambatan untuk terlibat. Dalam penelitian ini, aspek tersebut perlu ditelusuri melalui pengalaman DLHK, pemerintah wilayah, pengurus RT/RW, pengelola bank sampah, dan warga. Informasi tersebut dapat menjelaskan apakah kolaborasi dibangun melalui inisiatif bersama, arahan pemerintah, kebutuhan pelayanan, atau kombinasi dari beberapa faktor.

Kedua, **desain kelembagaan** berkaitan dengan aturan, pembagian tanggung jawab, keterwakilan aktor, dan prosedur koordinasi. Pengelolaan sampah membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan tindak lanjut pengaduan. Desain kelembagaan yang jelas dapat membantu mencegah tumpang tindih tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, penilaian terhadap desain tersebut perlu didukung dokumen atau keterangan informan mengenai mekanisme yang benar-benar berlaku.

Ketiga, **kepemimpinan fasilitatif** berkaitan dengan kemampuan aktor tertentu untuk mempertemukan kepentingan, memfasilitasi komunikasi, dan mendorong penyelesaian masalah bersama. Peran tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah daerah atau aktor lokal lain, sepanjang terdapat bukti mengenai tindakan yang dilakukan. Penelitian perlu mengidentifikasi siapa yang memprakarsai koordinasi, bagaimana perbedaan pendapat ditangani, dan bentuk dukungan yang diberikan agar kerja sama dapat berlangsung secara konsisten.

Keempat, **proses kolaboratif** mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Proses tersebut dapat diamati melalui musyawarah, koordinasi operasional, kegiatan bersama, kesepakatan mengenai pelayanan, dan tindak lanjut terhadap persoalan yang muncul. Kehadiran beberapa aktor dalam satu kegiatan belum cukup untuk membuktikan adanya proses kolaboratif yang kuat. Penelitian perlu menunjukkan apakah para aktor benar-benar bertukar pandangan, terlibat dalam keputusan, dan menjalankan tanggung jawab yang disepakati.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis pengelolaan sampah di Kota Kendari perlu berfokus pada hubungan antara pengaturan kelembagaan dan praktik di lapangan. Kolaborasi yang berkelanjutan memerlukan peran yang jelas, komunikasi dua arah, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban. Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat kemudian dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola persampahan yang lebih partisipatif.

Secara analitis, pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari dapat dikaji sebagai tata kelola yang membutuhkan hubungan saling melengkapi antara penyelenggara pelayanan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan sesuai kewenangan, sedangkan masyarakat berperan mendukung pengurangan sampah dari sumbernya, menjaga kebersihan lingkungan, dan menyampaikan kebutuhan serta keluhan pelayanan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan, pengurus RT/RW, pengelola bank sampah, petugas pengangkutan, dan mitra usaha dapat mengambil peran sesuai kapasitas dan keterlibatannya yang dapat dibuktikan.

Kualitas kolaborasi tidak cukup dinilai dari banyaknya program atau kegiatan kebersihan. Penilaian perlu memperhatikan apakah koordinasi berlangsung secara konsisten, pembagian tanggung jawab dipahami bersama, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, dan kesepakatan ditindaklanjuti. Selain itu, keberhasilan perlu dibedakan dari proses yang dirancang: keberadaan program merupakan bukti adanya upaya, sedangkan efektivitasnya memerlukan bukti mengenai pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat dibangun dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari, faktor apa yang mendukung atau menghambat proses tersebut, serta perbaikan kelembagaan yang diperlukan. Rumusan akhir mengenai kondisi kolaborasi harus ditetapkan setelah keterangan wawancara yang telah diverifikasi dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi lapangan.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah perkotaan di Kota Kendari memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui koordinasi kelembagaan, pembagian tanggung jawab yang jelas, partisipasi warga, serta dukungan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dalam perspektif collaborative governance, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan pelayanan pengangkutan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kepercayaan antaraktor, komitmen bersama, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Pemerintah kecamatan, kelurahan, pengurus RT/RW, pengelola bank sampah, petugas pengangkutan, serta sektor swasta berpotensi memperkuat tata kelola persampahan sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas aktor, perluasan partisipasi masyarakat, transparansi pelayanan, serta evaluasi yang berkelanjutan agar pengelolaan sampah di Kota Kendari dapat berlangsung secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Referensi

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. Public Administration Review, 66(Supplement 1), 44–55. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Munawir, A., Rusdiyanto, E., Muna, S. U. N., Yunandar, Ali, F., & Ihsan, M. (2024). Improving waste management sustainability: The role of institutional capacity and program objectives. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 14(3), 598. https://doi.org/10.29244/jpsl.14.3.598

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Pabia, Y. S., Matsunami, J., & Subanu, L. (2022). Collaborative governance in child-friendly city policy implementation in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 6(2), 249–266. https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.328

Pemerintah Kota Kendari. (2025, October 31). Ubah sampah jadi uang, Wali Kota Kendari jadikan Bank Sampah Kodya sebagai percontohan. https://berita.kendarikota.go.id/ubah-sampah-jadi-uang-wali-kota-kendari-jadikan-bank-sampah-kodya-sebagai-percontohan/

Pemerintah Kota Kendari. (2026, January 15). Pemkot Kendari gelar kerja bakti massal di RTH Papalimba, Wakil Wali Kota: Akan jadi agenda rutin. https://berita.kendarikota.go.id/pemkot-kendari-gelar-kerja-bakti-massal-di-rth-papalimba-wakil-wali-kota-akan-jadi-agenda-rutin/

Pemerintah Kota Kendari. (2026, September 4). Pemkot Kendari sosialisasikan sistem pengangkutan sampah berbasis LPS di Kecamatan Kendari. https://berita.kendarikota.go.id/pemkot-kendari-sosialisasikan-sistem-pengangkutan-sampah-berbasis-lps-di-kecamatan-kendari/

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Saputra, G. W., Santosa, P., & Adiwisastra, J. (2026). Efektivitas kebijakan sampah Kota Bandung: Peran collaborative governance dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, 8(1). https://doi.org/10.36085/jmpkp.v8i1.9066

Sudirman, F. A., & Phradiansah. (2019). Tinjauan implementasi pembangunan berkelanjutan: Pengelolaan sampah Kota Kendari. Sospol: Jurnal Sosial Politik, 5(2). https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821

Tafani, M. H., Azhar, & Prabujaya, S. P. (2026). Collaborative governance in waste management (case study: Lahat Regency). Jurnal Economina, 5(7), 3862–3869. https://doi.org/10.55681/economina.v5i7.3257

Ningtyas, L. A. (2026, January 25). DLHK Kendari gencarkan edukasi pengelolaan sampah. RRI.co.id. https://rri.co.id/kendari/regional/2131467/dlhk-kendari-gencarkan-edukasi-pengelolaan-sampah